

STRATEGI KEBIJAKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

POLICY STRATEGY OF VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN AN EFFORT TO INCREASE WELFARE

Muhammad Faizal Rezza Rahman¹, Muhammad Husein Maruapey², Saprudin³

¹Administrasi Publik, Universitas Djuanda. E-mail: rezafaizalmuhammad@gmail.com

²Administrasi Publik, Universitas Djuanda. E-mail: muhammadhusein1@unida.ac.id

³Administrasi Publik, Universitas Djuanda. E-mail: Saprudin@unida.ac.id

ABSTRACT

The most important thing about community empowerment is starting with how to create conditions, atmosphere or climate that allows the community's potential to develop. To achieve the goal of empowerment, various efforts through various strategies can be carried out. The government has an important role in encouraging the realization of community welfare, one of which is by providing policies and programs that support community welfare. However, regional governments have an interest in developing BUMDes, because the existence of these institutions is believed to be able to stimulate the economy in rural areas, which of course has a positive impact on development in the region. Through the Village Community Empowerment Institute (LPMD) as an institution authorized in the field of community and village empowerment, the regional government participates in encouraging the development of BUMDes. This research aims to analyze the policy strategies of community empowerment institutions and find out the problems and obstacles to these policy strategies in an effort to improve community welfare in Ciawi District.

Keywords : Empowerment, Policy, Strategy, Welfare.

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana menciptakan kondisi, suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai upaya melalui berbagai macam strategi dapat dilakukan. Pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan memberikan kebijakan maupun program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah bagaimanapun juga memiliki kepentingan dengan pengembangan BUMDes, karena keberadaan lembaga tersebut diyakini akan dapat menggerakkan ekonomi di perdesaan yang tentu berdampak positif terhadap Pembangunan di daerah. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai institusi yang diberi kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah daerah turut serta mendorong pengembangan BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat dan mengetahui permasalahan serta kendala pada strategi kebijakan tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawi.

Kata Kunci : Kebijakan, Kesejahteraan, Pemberdayaan, Strategi.

PENDAHULUAN

Saat ini pembangunan di Kawasan perdesaan di Indonesia memang memiliki daya dorong yang tinggi, pembangunan perdesaan menjadi salah satu program unggulan yang diusung oleh pemerintah daerah. BUMDes menjadi salah satu entitas bisnis di desa yang menjadi bidikan pemerintah daerah dalam program pembangunan tersebut. Mengutip pendapat Burbhan (1987), apabila pembangunan nasional digambarkan sebagai suatu lingkaran, maka titik pusat dari lingkaran tersebut adalah pembangunan perdesaan. Sebenarnya BUMDes sudah lama dikenal di Indonesia, tercatat pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan berbagai aturan turunannya sudah mengatur lembaga tersebut, namun sampai saat ini, masih sangat sedikit daerah yang sudah mempraktekannya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat menyebutkan bahwa "Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam melakukan tugas dan fungsinya, lembaga kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibantu oleh kader pemberdayaan masyarakat. Namun, pemerintah daerah bagaimanapun juga memiliki kepentingan dengan pengembangan BUMDes, karena keberadaan lembaga tersebut diyakini akan dapat menggerakkan ekonomi di perdesaan yang tentu berdampak positif terhadap pembangunan di daerah. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), sebagai institusi yang diberi kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintah daerah turut serta mendorong pengembangan BUMDes. Program BUMDes yang sudah berjalan di Kecamatan Ciawi khususnya di Desa Banjarwangi yaitu penjualan bubur bayi Aiko dan ubi madu yang sudah ekspor ke Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan lembaga pemberdayaan masyarakat dan mengetahui permasalahan serta kendala pada strategi

kebijakan tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawi.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai keberhasilan penelitian dibutuhkan adanya metode yang menunjang. Berdasarkan masalah dan latar belakang yang digunakan, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory* yaitu metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiolog; Barney Glaser dan Anselm Strauss. Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan *Grounded Theory* merupakan metode ilmiah, karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria yang dimaksud adalah adanya signifikansi, kesesuaian antara teori dan observasi, dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, adanya ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Bogdan Taylor (1992:21) Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang kompeten mengubah bahasa, gaya, dan perilaku orang menjadi data deskriptif yang diamati, Farida (2014). Dalam penelitian kualitatif peneliti berfungsi sebagai *key tools* untuk mengumpulkan informasi sendiri melalui dokumentasi dan wawancara dengan informan. Selanjutnya pengumpulan data bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan dapat dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan atau *library research* merupakan usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Informasi ini dapat diperoleh, dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, karangan ilmiah, tesis, skripsi, peraturan-peraturan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Kemudian dengan menggunakan penelitian lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan untuk memperoleh data yang menyangkut permasalahan untuk menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik-teknik observasi (pengamatan), *interview* (wawancara),

kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya, Sugiyono (2018).

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Tepatnya dimulai pada tanggal 13 November 2023. Bertempat di BUMDes Desa Banjarwangi yang beralamat di Jalan Veteran III Kav. Ussu Desa Banjarwangi RT 001/RW 001.

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi target/sasaran penelitian adalah strategi lembaga pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarwangi. Dan yang menjadi subjek penelitian adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Banjarwangi. Teknik memperoleh subjek dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ciawi, Ketua LPM Desa Banjarwangi, Kepala Desa Banjarwangi, Staff Desa sekaligus Dewan Pengawas BUMDes Desa Banjarwangi, dan pelaku program BUMDes Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi. Sumber kedua yaitu data sekunder berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari buku-buku, internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. Prosedur pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun. Sebelumnya wawancara dilakukan penelitian terhadap BUMDes dan lingkungan Desa Banjarwangi dalam penerapan program BUMDes. Selanjutnya dilakukan observasi, observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan sifat

penelitian karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan terlibat dimana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Metode observasi ini peneliti memilih jenis observasi partisipatif adalah observasi yang sekaligus melibatkan diri selaku orang dalam pada situasi tertentu. Hal ini agar memudahkan peneliti memperoleh data atau informasi dengan mudah dan leluasa.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisa berbagai data digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran data yang sudah ada. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari fakta empiris dengan terjun ke lapangan, mempelajari yang ada di lapangan. Komponen analisis data menurut Miles dan Hubberman, ada 4 yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian studi kasus ini berupa hasil observasi, angket dan hasil wawancara. Observasi dilakukan di BUMDes Desa Banjarwangi melalui pengamatan kegiatan satu hari yang dilakukan penulis selama kurang lebih 3 bulan. Pengamatan dilakukan di 3 unit yang berbeda. Dari hasil observasi ditemukan beberapa hal yang dianggap menjadi sebuah keunikan pada pelaksanaan program BUMDes diantaranya adalah: a) program bubur bayi yang berkolaborasi dengan Perusahaan pangan, b) pengelolaan sampah melalui bank sampah, dan c) produksi ubi madu yang di ekspor ke Jepang. Ketiga unit tersebut masuk kedalam strategi

peremberdayaan menurut Ismawan Priyono, pada tahun 1996 dalam Mardikanto dan Soebiato (2017:17) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat-guna. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Strategi Pemberdayaan pada BUMDes Desa banjarwangi

STRATEGI PEMBERDAYAAN	PENERAPAN
<i>Pengembangan Sumber Daya Manusia</i>	Dalam pengembangan sumber daya manusia BUMDes Banjarwangi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui unit BLK (Balai Latihan Kerja) Pengembangan sumber daya manusia masyarakat diperdayakan secara mandiri yang kemudian pemerintah mendirikan BUMDes sebagai wadah pengelola untuk pengembangan sumber daya manusia di desa. Pemerintah desa mendirikan BUMDes dengan peraturan Desa Banjarwangi Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada peraturan daerah. Dalam upaya menggerakkan perekonomian desa melalui program BUMDes merupakan tolak ukur dari sebuah peningkatan pertumbuhan pembangunan desa, memperdayakan

	masyarakat dan peningkatan terhadap ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa, ekonomi desa ditunjangi dengan berbagai metode pendekatan yang kemudian digerakkan seluruhnya oleh pemerintah desa. Kemandirian desa dalam rangka otonomi desa memerlukan persiapan yang serius, kesiapan lembaga digerakkan dan berperan aktif dalam memperdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
<i>Pengembangan Kelembagaan Kelompok</i>	Agar masyarakat miskin tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan pemerintah desa melakukan pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi dengan beberapa unit terselenggara yaitu kelompok khusus pengelola yaitu unit pengelola bubuk bayi Aiko, unit pengelola bank sampah, dan unit pengelola ubi madu. Disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan kelompok yang dijalankan sesuai dengan unit terselenggara telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, unit pengelola bubuk bayi Aiko, unit pengelola bank sampah, dan unit pengelola ubi madu adalah bagian dari

	<p>pengembangan program BUMDes yang dibentuk sesuai dengan program pembinaanya, pendampingan dalam proses pemberihan pelatihan dilibatkan secara permanen untuk keberlangsungan pengembangan kelompok, Agar masyarakat miskin tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan pemerintah desa melakukan pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi dengan beberapa unit terselenggara yaitu kelompok khusus pengelola yaitu unit pengelola bubur bayi Aiko, unit pengelola bank sampah, dan unit pengelola ubi madu. Disimpulkan bahwa pengembangan kelembagaan kelompok yang dijalankan sesuai dengan unit terselenggara telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan, unit pengelola bubur bayi Aiko, unit pengelola bank sampah, dan unit pengelola ubi madu adalah bagian dari pengembangan program BUMDes yang dibentuk sesuai dengan program pembinaanya, pendampingan dalam proses pemberihan pelatihan dilibatkan secara permanen untuk keberlangsungan pengembangan kelompok,</p>	<p>Pemupukan Modal Masyarakat (swasta)</p> <p>dikembangkan desa Banjarwangi bersumber dari APDes dan dari donatur (swasta). Dan pembagian modal diberikan BUMDes pada unit-unit pengelola, seperti unit pengelola bubur bayi Aiko, unit pengelola bank sampah, dan unit pengelola ubi madu. Demikian setiap unit dapat mengatur dan mengelola modal yang ada dibawah kendali atau pemantauan BUMDes Banjarwangi. Arah kebijakan keuangan desa, pemerintah desa memberikan modal kepada BUMDes untuk mengelola potensi desa sesuai program yang diselenggarakan. Modal yang diberikan pemerintah digolongkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat di dalamnya ada pengelolaan Potensi Desa oleh BUMdes. Modal ini kemudian dikembangkan oleh BUMdes sesuai dengan rancangan yang ditetapkan untuk mengelola potensi yang ada di desa.</p>	
	<p>Pemupukan modal masyarakat yang</p>	<p>Pengembangan Usaha Produktif</p> <p>Dalam Pengembangan usaha produktif masyarakat dituntut untuk diperdayakan berdasarkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha masyarakat menjadi lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, Pengembangan Usaha Produktif yang diselenggarakan</p>	

	<p>masyarakat desa Banjarwangi meliputi bubur bayi, pengelolaan bank sampah, dan produksi ubi madu. Bagian usaha produktif ini dikembangkan secara bersama oleh masyarakat yang memiliki keterampilan khusus, selanjutnya BUMDes memberikan pelatihan-pelatihan khusus pada masyarakat sesuai bidang keterampilan yang ditetapkan. Pemberdayaan dijalankan berdasarkan keterampilan yang dimiliki masyarakat, Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat produktif dalam meningkatkan keterampilan dan atau daya inovatif.</p>
<p>Penyediaan Informasi Tepat-Guna</p>	<p>Penyediaan informasi tepat guna dapat memanfaatkan media sosial, situs website pemerintah desa dalam proses marketing. Serta penyediaan informasi tepat guna pemerintah desa memanfaatkan media sosial sebagai propoganda marketing untuk mempublikasikan potensi desa yang dikelola, ketertarikan wisatawan lokal untuk mengunjung ke desa Banjarwangi digerakan melalui informasi media sosial online, demikian potensi desa yang diprogramkan BUMDes Banjarwangi dijadikan ICON wisata oleh pemerintah desa Banjarwangi.</p>

lembaga pemberdayaan masyarakat sudah menjalankan programnya untuk kesejahteraan masyarakat maka penulis mencoba melakukan pengukuran melalui penyebaran angket terkait program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Banjarwangi tersebut. Penyebaran angket dilakukan kepada pelaku program BUMDes dan beberapa warga masyarakat sebanyak masing-masing 10 butir pertanyaan. Dari hasil angket diketahui 80% masyarakat merasakan keuntungan dari program yang dijalankan. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 1) Ibu Eti Sunaryati, SSI, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di kantor Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; 2) Bapak Supratno Prasetyo selaku kepala Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; 3) Bapak Syarifudin selaku ketua LPM Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; 4) Bapak Muhamad Iqbal Fahmi selaku Dewan Pengawas BUMDes Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor; serta 5) saudari Melinda Nurrohmah selaku warga yang menjalankan program BUMDes Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Pembahasan

Dari hasil penelitian ditemukan beberapa hal yang dianggap menjadi sebuah keunggulan pada strategi lembaga pemberdayaan masyarakat desa Banjarwangi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) di Kecamatan Ciawi hanya desa Banjarwangi dan 2 desa lainnya yang aktif menjalankan program BUMDesnya,
- 2) program BUMDes di desa ini berjalan dengan baik karena keterlibatan stakeholder juga warga masyarakat yang mau bersama-sama membangun desa,
- 3) salah satu program BUMdes desa Banjarwangi yaitu ubi madu menjadi produk yang di ekspor ke Jepang menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa,

Untuk mengetahui sejauh mana strategi

banyak swasta juga turut membantu berjalannya program BUMDes di desa Banjarwangi.

KESIMPULAN

hasil penelitian yang saya lakukan, dapat saya simpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada proses pengembangan kelembagaan kelompok yang dibagi menjadi beberapa unit masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini salah satu program BUMDes di Desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi yaitu produksi ubi madu mengalami kemacetan pada staff khusus pengelola yang mengakibatkan produksi ubi madu untuk sementara berhenti terekspor ke Jepang. Strategi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Program BUMDes, pemerintah desa selaku penyelenggara otonomi desa menetapkan perdes tentang BUMDes. Peraturan Desa Banjarwangi Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Demikian BUMDes sebagai penggerak ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Banjarwangi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

SARAN

Dalam uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang semoga saja dapat membantu Desa Banjarwangi dalam menghadapi kendala pada saat melaksanakan kegiatan program BUMDes agar dapat kesejahteraan masyarakatnya, berikut saran-saran yang dapat diberikan:

1. Disarankan kepada pihak desa agar lebih memperhatikan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Sebab evaluasi inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan strategi yang telah diterapkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan BUMDes. Apabila strategi telah berjalan dengan

baik, tentunya patut untuk dipertahankan. Namun apabila strategi yang diterapkan gagal, diperlukan strategi lain yang lebih akurat, efektif dan efisien yang dapat dilakukan oleh pihak LPMD dan BUMDes. Selain itu juga diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensinya untuk memberikan arahan dan bimbingan juga selalu memonitor jalannya program BUMDes agar tidak terjadi kemacetan dalam pelaksanaannya.

2. Kepada penelitian lain disarankan untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam, tidak hanya kepada pihak desa saja, melainkan juga kepada pihak masyarakat untuk mengetahui efek yang didapatkan serta timbal balik yang diberikan secara langsung dari para penggiat BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, RLK. 2023. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berbasis Potensi Wilayah*. Jurnal JURISTIC, vol. 4 (1).
- Endah, K. 2020. *Permbudayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*. Jurnal MODERAT, vol. 6 (1).
- Husada Putra, Adnan. 2016. *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora*. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(2): 40-52.
- Kadeni. Dkk 2020. *Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. EQUILIBRIUM, vol. 8 (2).
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong. J. Lekxi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ilmiah CIVIS, vol 1 (2).
- Nur, A.A. 2023. *Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Manajemen (EKMAN) vol. 2 (2).
- Rahayu, S. dan R. Febrina. 2021. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui BUMDES Di Desa Sugai Nibung*. Jurnal Trias Politika, Vol 5 (1): 49 – 61.

- Rahmawati, E. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, vol 25 (1).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun masyarakat memperdayakan rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Toto Mardikanto, Poerwowo Soeboto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative